



LAPORAN KEUANGAN

Pemkot Jogja Tradisikan Penyerahan LKPD pada Bulan Januari

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY pada Kamis (30/1). Penyerahan ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya dilakukan pada bulan Maret.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, menuturkan majunya waktu penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari saran BPK RI Perwakilan DIY tahun lalu yang berharap penyerahan LKPD bisa dilakukan satu bulan setelah pergantian tahun atau tutup buku.

Dengan begitu penyerahan laporan tersebut sudah sesuai yang ditargetkan Pemkot, yakni akhir Januari. Begitu pula dalam laporan internal Pemkot setiap bulan, ia berharap setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat menyelesaikan laporannya maksimal 10 hari

setelah pergantian bulan. "Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan untuk tahun yang akan datang maksimal 15 hari," ujarnya, Kamis.

Menurutnya, dengan waktu penyerahan LKPD yang hanya satu bulan setelah pergantian tahun ini sangat bermanfaat khususnya untuk catatan laporan keuangan secara internal agar bisa lebih baik dan tertib, dari laporan tri wulan, semesteran dan akhir tahunan.

Majunya penyerahan LKPD kata dia, juga akan berpengaruh pada bisa semakin cepatnya pembahasan anggaran perubahan yang otomatis akan semakin maju pula. "Sehingga penyerapan

anggaran kepada masyarakat bisa terealisasi secara lebih maksimal," ungkapnya.

Pemkot menjadi daerah kedua di DIY yang telah menyerahkan LKPD, setelah Kabupaten Sleman. Namun menurut Haryadi, yang terpenting bukan daerah mana yang paling cepat, namun lebih pada aspek ketepatan dan keterbacaan penyerahan laporan. "Saya berharap apa yang menjadi tugas Pemkot dapat berjalan sinergis dengan tepatnya penyerahan laporan ini," ucap Haryadi.

Review & Evaluasi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, mengatakan sebelum diserahkan ke BPK RI Perwakilan DIY, LKPD

terlebih dahulu dilakukan review dan evaluasi oleh Inspektorat Kota Jogja. Setelah diserahkan, BPK RI Perwakilan DIY akan mengaudit LKPD selama sekitar dua bulan, dan kemudian diberikan hasil auditnya pada Pemkot.

Dalam hasil audit, selain penilaian juga akan ada sejumlah catatan dan evaluasi. Pemkot diberi tenggat waktu dan tata cara untuk menindaklanjuti catatan dan evaluasi tersebut. "Evaluasi tahun lalu sudah ditindaklanjuti semua, langsung setelah keluar hasil audit," katanya.

Adapun sejumlah catatan dari hasil audit LKPD Pemkot Jogja tahun lalu di antaranya pengelolaan persediaan belum terbit, seperti pengurusan barang tidak menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran persediaan dalam Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada) secara tepat waktu dan satuan barang yang sama dalam simbada belum konsisten.

Lalu dalam pengelolaan aset tetap Pemkot Jogja juga belum memadai, dalam penataan aset tetap Kota Jogja menggunakan aplikasi Simbada yang peng-

gunaannya hanya bisa dilakukan di BPKAD Jogja, dan sistem belum bisa menampilkan kondisi barang.

Untuk itu, sebagai langkah tindak lanjut, mulai Juli 2019, Pemkot Jogja telah menerapkan sistem rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dan rekonsiliasi realisasi anggaran setiap bulan. "Sebelumnya dilakukan setiap triwulan. Mulai semester dua 2019 kami buat setiap bulan," ujarnya.

Dengan rekonsiliasi setiap OPD yang dilakukan tiap bulan tersebut, selain menertibkan dan menambah valid laporan juga turut mempermudah penyusunan LKPD Pemkot. "LKPD ternyata bisa dibuat dalam satu bulan, bukan hanya kerja BPKAD tapi semua dinas," ungkapnya.

Senada dengan Haryadi, dia menjelaskan semakin majunya penyerahan LKPD akan mempercepat pula pembahasan anggaran perubahan, yang bisa dilakukan segera setelah hasil audit keluar. Dengan cepatnya pembahasan anggaran, maka semakin panjang pula waktu untuk realisasi dan hasilnya pun akan lebih optimal.

Opini WTP

Pada tahun sebelumnya, hasil audit BPK RI Perwakilan DIY menyatakan LKPD Pemkot Jogja mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia pun berharap untuk LKPD 2019 ini Pemkot juga bisa mendapat opini WTP kembali.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Andri Yogama, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan LKPD Pemkot Jogja selama 40 hari kerja di lapangan dengan hari Sabtu dihitung. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemberian laporan.

"Saya harap dari laporan itu ada diskusi terkait masalah masalah yang mungkin muncul, juga semoga kedepannya kerjasama lebih baik, bukan nilainya saja tapi manfaatnya bagi masyarakat. Dari pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan cepat akan meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari laporan keuangan," ujarnya. (Adv)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005